



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung
No. 281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi
Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan tahun
2019**

**(Studi Kasus : Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan
Cidadap)**

Skripsi

Oleh:

Gaffin Natana Ramdhano

2015310063

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung
No. 281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi
Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan tahun
2019 (Studi Kasus : Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan
Cidadap)**

Skripsi

Oleh:

Gaffin Natana Ramdhano

2015310063

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra., M. Si.

Bandung
2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



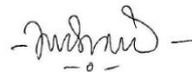
Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Gaffin Natana Ramdhano
Nomor Pokok : 2015310063
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung No. 281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2019 (Studi Kasus: Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 04 Agustus 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Indraswari, M.A., Ph.D.

: 

Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

Anggota

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Gaffin Natana Ramdhano
Nomor Pokok : 2015311063
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung No. 281
Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan
Pembangunan Kewilayahan tahun 2019
(Studi Kasus: Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap)

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Bandung, 23 Juli 2020

Pembimbing,

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gaffin Natana Ramdhano
NPM : 2015310063
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Publik Peraturan Wali Kota Bandung
No.281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan
Pembangunan Kewilayahan (Studi Kasus: Kelurahan Hegarmanah,
Kecamatan Cidadap)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Juli 2020



Gaffin Natana Ramdhano

Abstrak

Nama : Gaffin Natana Ramdhano
NPM : 2015310063
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung No.281 Tahun 2015 mengenai Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2019 (Studi Kasus : Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan di Kelurahan Hegarmanah. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Edward III yang mengemukakan 4 variable yaitu *sumber daya*, *komunikasi*, *disposisi*, dan *struktur birokrasi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 4 (empat) variable yang dikemukakan Edward berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan di Kelurahan Hegarmanah, dengan hasil yang menunjukkan *sumber daya* manusia yang mumpuni, sumber dana yang cukup dengan penyerapan yang tinggi, terdapat transmisi *komunikasi* yang jelas dan konsisten, terpenuhinya aspek kognitif dan afektif didalam *disposisi*, serta adanya SOP yang memudahkan jalannya *struktur birokrasi* yang baik maka dapat mewujudkan keberhasilan implementasi Program Inovasi Pemberdayaan dan Kewilayahan Pembangunan di Kelurahan Hegarmanah Kota Bandung 2019.

Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan, Pemberdayaan

Abstract

Name : Gaffin Natana Ramdhano
NPM : 2015310063
Title : *Implementation of Bandung's Mayor Regulatory Number 281 2015 regarding Innovation Program for Empowerment and Regional Development in 2019 (Case Study: Hegarmanah District)*

This study aims to find out what factors influence the success of the Empowerment and Regional Development Innovation Program in Hegarmanah district. The theory used is Edward III Implementation Theory which proposes 4 variables, namely resources, communication, disposition, and bureaucratic structure.

The results of this study indicate that the 4 (four) variables put forward by Edward have an effect on the successful implementation of the Innovation Program for Empowerment and Territorial Development in Hegarmanah District, with the results showing capable human resources, sufficient funding sources with high absorption, there are communication transmissions. clear and consistent, the fulfillment of cognitive and affective aspects in disposition, and the existence of SOPs that facilitate the running of a good bureaucratic structure, so that it can realize the successful implementation of the Empowerment and Territorial Development Innovation Program in Hegarmanah District, Bandung City 2019.

Keywords: Implementation, Development, Empowerment

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan kurniaNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No.281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2019 (Studi Kasus : Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap)”. Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah untuk memenuhi syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, banyak kesalahan yang penulis perbuat. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun guna membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis mengucapkan terimakasih pada kesempatan kali ini kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang diberikan, kepada keluarga serta dikhususkan kepada nenek dan ibu tercinta selalu mendoakan yaitu Enok Sumarsi dan Lina Herlina, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan kasih sayang tiada henti kepada penulis. Saya ucapkan terimakasih pula kepada Ibu Dra. Susana Ani Berliyanti selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing dan selalu memberikan waktu kepada saya dalam proses pembuatan karya ilmiah ini, berkat beliau saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan benar. Tidak lupa juga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Susana Ani Berliyanti Dra., M.Si selaku Dosen Pembimbing.
3. Mas Trisno Sakti Herwanto, S. IP., MPA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
4. Mas Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si selaku Dosen Wali.
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
6. Bapak Suhendar selaku Sekretaris Kelurahan Hegarmanah, Bapak Wawan Koordinator LPM Kelurahan Hegarmanah, Ibu Vivi anggota Karang Taruna Kelurahan Hegarmanah, Ibu Lilis anggota PKK Kelurahan Hegarmanah, dan Bapak Hilman coordinator BKM Kelurahan Hegarmanah terimakasih atas waktu diluangkan untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
7. Teman-teman SMA, Kariza, Vicko, Wibi, Aliando dan Hamdan
8. Teman-teman MBHKNG, terkhusus kepada Akmal, Fadil, Harry, dan Willy
9. Teman-teman KKL
10. Tim Misbar Cinema Bandung
11. Teman-teman bimbingan seminar sampai skripsi
12. Serta semua pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian adalah salah satu alasan mengapa karya ini bisa diselesaikan

Semoga Allah SWT dapat membalas semua jasa pihak-pihak yang selama ini membantu saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Bandung, 23 Juli 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters that appear to be 'GN' followed by a flourish.

Gaffin Natana Ramdhano

DAFTAR ISI

Abstrak.....	7
Abstract	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	12
DAFTAR TABEL.....	15
DAFTAR GAMBAR.....	16
BAB I.....	17
PENDAHULUAN.....	17
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	17
1.2 Identifikasi Masalah.....	22
1.3 Rumusan Masalah.....	23
1.4 Pertanyaan Penelitian.....	23
1.5 Tujuan Penelitian.....	23
1.6 Kegunaan Penelitian.....	23
1.7 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	25
2.2 Program Inovasi Pembangunan Kewilayahan Kota Bandung.....	Error!
Bookmark not defined.	
2.2.1 Definsi PIPPK.....	28

2.2.2 Stakeholder PIPPK	29
2.2.3 Jenis Kegiatan PIPPK	29
2.2.4 Ruang Lingkup Kegiatan PIPPK	30
2.2.5 Mekanisme implementasi PIPPK	31
2.2.6 Peran Stakeholder dalam PIPPK	31
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	33
2.4 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	34
2.5 Fokus Implementasi	35
2.6 Model Penelitian	41
<i>Ilustrasi interpretasi Peneliti</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III	43
METODE OBJEK PENELITIAN	43
3.1 Rancangan Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Peran Peneliti	44
3.4 Sumber Data	45
3.5. Metode Pengumpulan Data	46
3.6 Analisis Data Kualitatif	47
3.7 Instrumen Penelitian	49
3.8 Pengecekan Keabsahan Data	49
3.9 Operasional Variabel	51
BAB IV	56
GAMBARAN UMUM	56
4.1 Profil Kelurahan	56
4.1.1 Data Statis	56
4.1.2 Data Dinamis	61
BAB V	66

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	66
5.1 Mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan	67
5.2 Sumber Daya	72
5.3 Tingkat Disposisi	78
5.4 Komunikasi	80
5.5 Sturuktur Birokrasi	83
BAB VI	86
KESIMPULAN DAN SARAN	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3.9 1 Operasional Variable	52
4.1 1 tabel daftar kondisi kantor kelurahan	58
4.1 2 table data sarana kerja kantor kelurahan	58
4.1 3 tabel jumlah RT RW	60
4.1 4 Tabel komposisi karyawan kelurahan	61
4.1 5 Tabel berdasarkan eselonering	63
4.1 6 tabel komposisi karyawan pangkat/golongan.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 1 Realisasi Kegiatan PIPPK20

Gambar 2.5 1 Elemen penentu keberhasilan mplementasi menurut Edward41

Gambar 5.1 1 rapat PIPPK antara anggota LKK dan Aparatur Kewilayahan.....69

Gambar 5.1 2 Aparatur Kewilayahan dan LKK saat turun kelapangan.....70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Membangun NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) melalui daerah dalam kerangka Negara kesatuan adalah sebuah bunyi poin 3 dari Nawacita. Nawacita adalah agenda prioritas Pemerintah Presiden Indonesia era Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019. Kota Bandung sebagai salah satu contoh wujud nyata akan keberlangsungan agenda prioritas Nawacita yang telah menjalankan Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) sebagai representasi Nawacita yang memiliki dasar tujuan yang sama yaitu “meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui program PIPPK”. Maka dari itu Kota Bandung menjadi salah satu referensi berbagai daerah akan implementasi Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan atau yang disingkat PIPPK karena Pemerintah Kota Bandung melakukan penerapan konsep kolaboratif serta desentralisasi sangat detil dan baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹

Program Pemberdayaan Inovasi Pembangunan Kewilayahan atau yang disingkat PIPPK adalah program dari Peraturan Wali Kota Bandung No.281 Tahun 2015 yang didelegasikan kepada unit kerja regional yang didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat. Maksud dan tujuan *PIPPK* seperti yang tertuang pada *Perwalkot Bandung no 281 tahun 2015 BAB II pasal 2* yakni untuk meningkatkan

¹ Dede Suherlan, PIPPK Kota Bandung Jadi Referensi Berbagai Wilayah, Jabar News, <https://jabarnews.com/read/51402/>, diakses pada 3 September 2019 pukul 21.17 WIB

tugas peran dan fungsi aparatur daerah dan semua pemangku kepentingan lembaga komunitas kelurahan dalam konteks percepatan, implementasian, pembangunan melalui pembangunan, pemberdayaan masyarakat². PIPPK memiliki 12 prinsip yang dituangkan dalam “*Juknis Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayayahan 436 2015*” :

1. “*Bertumpu pada Pembangunan Manusia, yaitu pelaksanaan PIPPK senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya*”;³
2. “*Berorientasi pada Masyarakat Pra Sejahtera, yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan melalui PIPPK mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya terutama masyarakat pra sejahtera*”;⁴
3. “*Inovasi, yaitu suatu proses yang mengubah ide baru, gagasan atau modifikasi gagasan dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat*”.⁵
4. “*Partisipasi melalui PIPPK, yaitu masyarakat terlibat secara aktif pada proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan termasuk pertanggungjawaban*”;⁶

² Perwal Kota Bandung No.281 Tahun 2015 Pasal 2 diakses pada 3 September 2019 pukul 21.43 WIB

³ Juknis PIPPK Tahun 2015 diakses pada 4 September 2019 pukul 20.14 WIB

⁴ Ibid hal 3

⁵ Ibid hal 3

⁶ Ibid hal 3

5. *“Otonomi dalam pelaksanaan PIPPK, yaitu masyarakat memiliki kewenangan dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola pembangunan secara mandiri”;*

7

6. *“Desentralisasi melalui PIPPK, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan dilimpahkan kepada pemerintah kewilayahan dan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya; 3 Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIPPK”*⁸

7. *“Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PIPPK yaitu, kesetaraan peran pada setiap tahapan proses pembangunan serta menerima manfaat dari hasil pembangunan secara adil”;*⁹

8. *“Demokratis melalui PIPPK yaitu, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat”;*¹⁰

9. *“Transparansi dan Akuntabel melalui PIPPK yaitu, masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif”;*¹¹

⁷ Ibid hal 3

⁸ Ibid hal 3

⁹ Ibid hal 4

¹⁰ Ibid hal 4

¹¹ Ibid hal 4

10. “Prioritas melalui PIPPK, yaitu harus memprioritaskan pembangunan berbasis inovasi dan pemberdayaan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai potensi”;¹²

11. “Kolaborasi melalui PIPPK, yaitu semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam proses pembangunan”;¹³

12. “Keberlanjutan melalui PIPPK, yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan”.¹⁴

Didalam implementasinya, PIPPK diharapkan dapat mewujudkan sinergi kinerja aparatur daerah dengan organisasi masyarakat dalam mengimplementasikan PIPPK berdasarkan pemberdayaan masyarakat.¹⁵ Ideal nya PIPPK tahun pertama fokusnya pada infrastruktur dan kebersihan, kemudian di tahun berikut fokus pada pemberdayaan ekonomi, berbagai program pembangunan dimandatkan untuk setiap kelurahan berdasarkan kebutuhan masing-masing kelurahan, berdasarkan kerja sama antara *Pemkot Bandung* dan elemen masyarakat disetiap daerah.¹⁶ Hal tersebut bertujuan untuk percepatan serta pemerataan dalam pembangunan Kota Bandung dengan menjaring ide-ide inovatif masyarakat dengan mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi penyediaan sarana prasarana pendukung inovasi

¹² Ibid hal 4

¹³ Ibid hal 4

¹⁴ Ibid hal 4

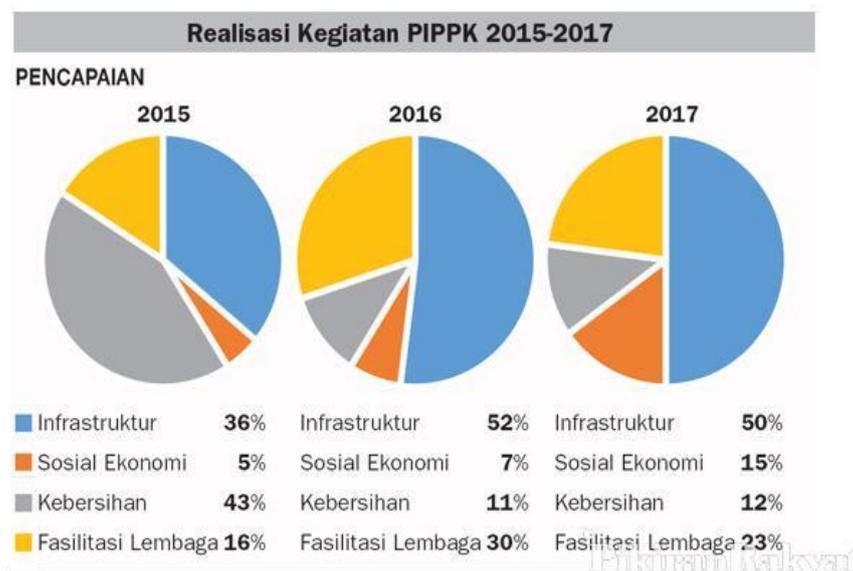
¹⁵ Perwal Kota Bandung No.281 Tahun 2015 Pasal 2

¹⁶ Juknis PIPPK Tahun 2015

dan Kota Bandung harus secara optimal dalam mengola hal tersebut yang tentunya didasari prinsip efisiensi dan efektifitas. Hal ini berarti didalam implementasinya program PIPPK perlu dilaksanakannya inovasi dalam pembangunan, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, serta desentralisasi dimana implementasi pembangunan diusulkan oleh masyarakat kepada Pemerintah. Di tahun 2020 ini program tersebut memasuki tahun ke 5.

Berdasarkan temuan awal peneliti dari sumber media online yaitu “*Pikiran Rakyat*”, keberhasilan implementasi program (PIPPK) disetiap Kelurahan di Kota Bandung tinggi, hal tersebut bisa dilihat dari data di gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1 1 Realisasi Kegiatan PIPPK



Sumber gambar : Pikiran Rakyat

Hal tersebut menandakan bahwa telah tercipta “sinergitas kinerja antara aparaturn kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka

percepatan pelaksanaan pembangunan” yang disebabkan karena besarnya penyerapan anggaran .

Dari pernyataan di atas maka tujuan PIPPK ada indikasi tercapai jika dilihat dari penyerapan anggaran yang mewujudkan “*sinergitas kinerja antara aparat daerah dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan*” yang ditunjukkan dengan tingginya penyerapan dana yang berkaitan dengan faktor *sumber daya anggaran*.

Maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dengan memilih lokasi penelitian di kelurahan Hegarmanah yang penyerapan *sumber daya anggarannya* cenderung tinggi sebesar 84,55% dan juga mendapatkan penghargaan Kategori LKK (terbaik II) maka penelitian akan menggunakan teori dari Edward III dengan mengukur faktor lainnya untuk mengukur keberhasilan selain faktor *sumber daya* yaitu diantaranya *komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi*.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut data sekunder yang diperoleh telah menunjukkan terciptanya “*sinergitas kinerja antara aparat daerah dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan*” yang disebabkan karena tingginya penyerapan *sumber daya anggaran* sebesar 84,55% dan berkaitan dengan variable *sumber daya* yang diambil dari teori Edward III.

Dalam penelitian ini penulis memilih salah satu sample kelurahan di kecamatan Cidadap yang berpartisipasi didalam PIPPK dan mendapatkan PIPPK awards dalam kategori LKK terbaik (II) tahun 2018 yakni kelurahan Hegarmanah.

1.3 Rumusan Masalah

Ada indikasi bahwa Implementasi PIPPK di Kelurahan Hegarmanah cenderung tinggi, jika dilihat dari dimensi penyerapan *sumber daya anggaran*.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *PIPPK* 2019 Kelurahan Hegarmanah?

1.5 Tujuan Penelitian

Menguraikan implementasi *PIPPK* tahun 2019 di Kelurahan Hegarmanah hingga peneliti memperoleh cara pelaksanaan yang efektif di kelurahan Hegarmanah.

1.6 Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- *Kegunaan praktis* diharapkan agar menjadi hal yang membangun untuk Kelurahan Hegarmanah karena penelitian ini ingin melihat apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *PIPPK* di Kelurahan Hegarmanah. Di sisilain penelitian ini bisa menjadi tolak ukur atau acuan dalam implementasinya bagi kelurahan lainnya.
- *Kegunaan teoritis*. dalam penelitian ini untuk memperluas wawasan dalam disiplin *ilmu administrasi publik*

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Perwal Kota Bandung no 281 tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan dengan melihat efektifitas Implementasinya. Maka dari itu sistematika penulisannya terdiri dari enam BAB yakni:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai dasar teori yang peneliti gunakan dalam penelitian.

3. Bab III Metode Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, dan metode pengumpulan data

4. Bab IV Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan mengenai profil objek penelitian

5. Bab V Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai mendeskripsikan hasil temuan penelitian di lapangan, mengenai keberhasilan implementasi PIPPK.

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari awal hingga akhir penelitian serta saran.